

MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN REGULASI TERHADAP *SOCIAL COMMERCE* TIKTOK SHOP: AGENDA SETTING UNTUK KEBIJAKAN PUBLIK

Septiya¹

Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

E-mail: septiya706@gmail.com

PENDAHULUAN

TikTok Shop telah menciptakan dampak yang signifikan pada penjual offline dengan membuat mereka mengalami penurunan jumlah pembeli. Pertama, platform ini menawarkan kenyamanan dan aksesibilitas yang tinggi bagi konsumen. Mereka dapat menjelajahi berbagai produk dan membeli tanpa harus meninggalkan rumah mereka. Hal ini mengurangi motivasi konsumen untuk berbelanja langsung di toko fisik, yang mengarah pada penurunan pembeli offline. Selain itu, TikTok Shop juga menawarkan berbagai insentif, diskon, dan promosi yang menarik bagi konsumen. Dalam upaya bersaing, penjual offline mungkin kesulitan untuk menyediakan penawaran yang sebanding, yang bisa memengaruhi minat konsumen untuk berbelanja di tempat fisik.

Perubahan preferensi konsumen yang semakin bergerak ke platform online juga dapat berdampak negatif pada penjual offline. Pandemi COVID-19 telah mempercepat peralihan ini, di mana konsumen merasa lebih aman berbelanja secara online. Penjual offline perlu beradaptasi dengan cepat dengan cara-cara baru untuk menarik pembeli, seperti menghadirkan pengalaman berbelanja yang unik atau integrasi dengan platform e-commerce. Dengan memahami perubahan perilaku konsumen ini, penjual offline dapat mencari solusi untuk menjaga daya tarik dan pertumbuhan bisnis mereka.

Pada bulan September 2021, TikTok meluncurkan fitur yang memudahkan pengguna untuk berbelanja dari toko atau brand favorit melalui aplikasi bernama TikTok Shop. TikTok Shop merupakan fitur *social commerce* yang memungkinkan pengguna dan kreator untuk mempromosikan serta menjual produknya melalui TikTok. Fitur belanja ini hadir di TikTok sebagai respon terhadap meningkatnya penjualan berbagai produk setelah *brand* melakukan promosi melalui *platform* media sosial tersebut.

TikTok Shop adalah fitur *social commerce* yang memungkinkan pengguna dan kreator untuk mempromosikan serta menjual produknya melalui TikTok. Namun, TikTok Shop belum memiliki izin resmi untuk berjualan atau menjadi loka pasar. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait regulasi dan pengawasan terhadap *social commerce* seperti TikTok Shop. Pemberian izin untuk TikTok Shop sebagai *e-commerce* di Indonesia menjadi perhatian penting dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang. *E-commerce* telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis di Indonesia. Pertumbuhan pesatnya selama beberapa tahun terakhir telah menciptakan peluang ekonomi yang besar, tetapi juga menimbulkan sejumlah tantangan, termasuk dalam hal regulasi. TikTok Shop, sebagai *platform e-commerce* yang populer, telah menarik perhatian banyak pengguna di Indonesia, sehingga menjadi penting untuk mengatur kehadirannya dalam rangka menciptakan lingkungan bisnis yang stabil.

Pertimbangan perizinan TikTok Shop juga terkait dengan persaingan di pasar *e-commerce*. Persaingan yang ketat di antara berbagai *platform e-commerce* di Indonesia dapat memengaruhi harga, kualitas layanan, dan inovasi produk. Oleh karena itu, pemberian izin kepada TikTok Shop harus memperhatikan dampaknya terhadap dinamika persaingan dan mengupayakan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.

Penting untuk mencatat bahwa TikTok Shop sebagai platform media sosial yang terintegrasi dengan fitur belanja memberikan dinamika baru dalam dunia *e-commerce*. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana regulasi perlu beradaptasi untuk mengatasi aspek-aspek unik yang dimiliki oleh TikTok Shop, seperti promosi produk melalui konten pengguna. Oleh karena itu, latar belakang perizinan TikTok Shop harus mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan praktis dalam mengatur platform ini dalam konteks pasar *e-commerce* Indonesia yang berkembang pesat. Penutupan izin TikTok Shop dapat memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan. Selain itu, penutupan TikTok Shop juga dapat memengaruhi berbagai pihak yang bergantung pada platform ini. Oleh karena itu, penutupan izin TikTok Shop dapat memiliki dampak yang kompleks pada masyarakat, termasuk mereka yang berjualan offline salah satunya di Tanah Abang dan online.

Dampak positif dari penutupan perizinan TikTok Shop ini salah satunya yaitu penutupan TikTok Shop dapat mengurangi persaingan yang ketat dalam *e-commerce*, memberikan peluang lebih besar bagi pelaku bisnis kecil dan menengah, termasuk pedagang *offline* di Tanah Abang, untuk bersaing dengan platform *e-commerce* besar. Selain itu hal ini juga

berdampak terhadap bisnis lokal, penutupan izin TikTok Shop dapat mendorong masyarakat untuk berbelanja lebih banyak dari bisnis lokal, seperti pedagang di Tanah Abang, yang dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal.

Dampak negatif dari penutupan perizinan TikTok Shop ini salah satunya yaitu hilangnya lapangan kerja, penutupan TikTok Shop dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan bagi mereka yang bekerja di *platform* ini, termasuk *influencer* dan staf yang terlibat dalam operasionalnya. Selain itu hal ini juga berdampak terhadap pengusaha kecil, pedagang kecil di Tanah Abang yang telah berjualan melalui TikTok Shop mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan ini dan menghadapi persaingan yang lebih ketat dalam model bisnis online yang lain.

Penutupan TikTok Shop juga didasarkan pada Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penutupan izin TikTok Shop adalah langkah yang perlu dipertimbangkan secara matang, dengan memperhitungkan dampaknya terhadap berbagai pihak, baik pedagang offline di Tanah Abang maupun bisnis online. Regulator perlu mencari keseimbangan antara perlindungan konsumen, perlindungan persaingan, dan dukungan terhadap pengusaha lokal dalam mengambil keputusan terkait regulasi.

Umumnya, permasalahan diartikan sebagai situasi atau keadaan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan atau kebutuhan tertentu bagi sebagian orang sehingga membutuhkan suatu solusi atau pertolongan dalam memecahkan masalah tersebut. Sementara suatu masalah akan dapat menjadi masalah publik jika masalah tersebut melibatkan orang lain yang jumlahnya tidak sedikit atau memberi dampak yang luas bagi masyarakat (Anggara, 2014). Penutupan izin TikTok Shop merupakan masalah publik yang berdampak luas terhadap masyarakat Indonesia. Berbagai isu berkembang di masyarakat luas berkenaan dengan penutupan izin TikTok Shop. Sehingga membutuhkan solusi dari pemerintah berupa kebijakan penyesuaian berkaitan dengan izin *e-commerce* tersebut.

Kebijakan publik merupakan rangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dengan proses kegiatan yang bersifat politis. Pada suatu kebijakan publik terdapat tahap-tahap pembuatan kebijakan publik yang baik, diantaranya terdiri dari penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap penyusunan agenda atau agenda setting merupakan bagian penting

sebagai langkah awal dari tahapan pembuatan kebijakan, dimana pada tahap ini merupakan kunci yang harus dilalui oleh sebuah isu/masalah sehingga dapat diangkat dalam agenda pemerintah untuk selanjutnya dipecahkan melalui tindakan kebijakan (AG Subarsono dalam Hamidah 2019)

Sebagai langkah awal dalam realitas kebijakan publik, berbagai isu yang muncul akibat adanya penutupan TikTok Shop haruslah melewati tahap *agenda setting* untuk dapat menjadi perhatian pemerintah. Pada tahap ini, berbagai isu kemudian diseleksi. Karena berbagai isu yang timbul tidak lantas dapat dijadikan sebagai agenda kebijakan pemerintah, melainkan hanya sebagian isu saja yang mendapat perhatian pemerintah.

PEMBAHASAN

KEBIJAKAN PUBLIK

Andriansyah dalam (Taufiqurrokhman, 2014) menyebutkan kebijakan publik atau *public policy* merupakan aturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati, siapapun yang melanggar maka akan dikenai sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi tersebut. (Howlett, 2014) mengatakan kebijakan publik merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mengubah aspek perilaku yang ada pada diri mereka sendiri maupun kelompok sosial untuk tujuan tertentu, atau akhir yang terdiri dari beberapa peraturan yang biasanya bersifat kompleks guna mencapai suatu tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Menurut Serema (Amanta & Kusumasari, 2019) kebijakan publik dipahami sebagai suatu tindakan yang disengaja dan mengikat yang dilakukan oleh organ-organ negara yang bertanggungjawab dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku masyarakat.

Secara lebih jauh, Charles O. Jones dalam (Abdal, 2015) memandang kebijakan publik merupakan kelanjutan dari kegiatan pemerintah yang dilakukan di masa lalu, dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Hal ini dapat dikategorikan sebagai decision making yang memiliki arti pemerintah membuat suatu keputusan untuk suatu tindakan tertentu. Jones menekankan studi kebijakan publik pada dua proses, diantaranya: a.) Proses-proses yang ada dalam ilmu politik, sebagaimana masalah-masalah yang terjadi akan sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah tersebut, dan juga bagaimana tindakan yang diambil oleh pemerintah; b.) refleksi tentang reaksi yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap masalah-masalah, kebijakan negara serta usaha untuk memecahkannya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan publik merupakan serangkaian aturan-aturan dan tindakan yang saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Kebijakan publik dapat bersifat memaksa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam mempengaruhi perilaku masyarakat dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Menurut Jones dalam (Abdal, 2015) kebijakan publik ditekankan pada dua proses utama, yakni bagaimana masalah yang terjadi kemudian dapat menjadi perhatian pemerintah, lalu didefinisikan sehingga usaha apa dan bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat oleh aktor kebijakan yang memiliki wewenang, yakni pemerintah dengan maksud untuk mengatur perilaku masyarakat. Pemerintah yang memiliki wewenang dalam kebijakan penutupan TikTok Shop yang dimaksud adalah Kementerian Perdagangan yang memiliki wewenang dalam perizinan dan penutupan usaha yang ada di Indonesia.

Tingkatan kebijakan secara umum menurut Abidin dalam (Anggara, 2014) dapat dipahami menjadi tiga tingkatan, diantaranya:

1. Kebijakan umum, merupakan kebijakan yang menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun negatif. Kebijakan ini meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan, merupakan kebijakan yang menjelaskan mengenai kebijakan umum. Jika dalam tingkat pusat, seperti peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang tertentu.
3. Kebijakan teknis, merupakan kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Berdasarkan pada tingkatan kebijakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibagi menjadi menjadi dua macam yakni tingkatan kebijakan secara umum dan tingkatan kebijakan secara teknis. Tingkatan kebijakan publik secara umum kebijakan publik terdiri dari kebijakan umum yang menjadi pedoman, kebijakan pelaksanaan yang merupakan penjelasan mengenai kebijakan umum dan juga kebijakan teknis/operasional. Sedangkan tingkatan kebijakan publik secara teknis terbagi dalam lingkup nasional dan lingkup wilayah daerah. Kebijakan penutupan penjualan melalui *social commerce* TikTok Shop. pada dasarnya termasuk kedalam kebijakan lingkup nasional, yang berlaku diseluruh Indonesia. Kebijakan dalam penutupan serta larangan penjualan melalui *social commerce* TikTok Shop yang

ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan yang kemudian diberlakukan kepada seluruh *influencer* dan distributor yang melakukan jual beli melalui TikTok Shop di seluruh Indonesia.

TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tahapan dalam kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam (Puspita, 2016) diawali dengan penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Menurut AG Subarsono yang dikutip oleh Hamidah (2019). Proses Kebijakan publik merupakan rangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dengan proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas ini terlihat dalam rangkaian kegiatan yang terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kelima tahapan dalam pembuatan kebijakan publik menurut AG Subarsono yang dikutip oleh Hamidah (2019) dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Tahapan Kebijakan Publik

Sumber: Subarsono, dalam Hamidah (2019)

1. Tahap Agenda Setting (Perumusan Masalah)

Tahapan ini merupakan langkah kunci yang harus dilalui ketika suatu isu masuk dan dapat diangkat dalam agenda pemerintah. Pada tahap perumusan masalah, tidak semua masalah dapat dikategorikan sebagai agenda kebijakan. Ada kalanya suatu masalah tidak akan dibahas sama sekali, ada masalah yang ditetapkan sebagai fokus kebijakan, dan ada juga yang ditunda dengan alasan tertentu untuk waktu yang belum bisa dipastikan. Kegiatan dalam rangka membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*) sering disebut dengan penyusunan agenda (*agenda setting*)

2. Tahap Formulasi Kebijakan (Forecasting)

Forecasting merupakan kegiatan dalam menentukan informasi yang faktual sesuai dengan realita tentang situasi di masa depan atas dasar informasi yang ada pada saat ini. Tujuan utama dari adanya forecasting yakni untuk memberikan informasi mengenai kebijakan di masa depan dan konsekuensinya, melakukan kontrol serta intervensi kebijakan dalam rangka mempengaruhi perubahan sehingga akan mengurangi resiko yang akan ditimbulkan. Masalah yang sudah lolos dalam tahap perumusan kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan, kemudian dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan tersebut dipilihlah alternatif kebijakan yang paling tepat untuk memecahkan masalah.

3. Tahap Adopsi Kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)

Rekomendasi kebijakan merupakan suatu proses dalam menentukan pilihan terhadap berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Rekomendasi kebijakan juga membahas berbagai macam model kebijakan yang sebelumnya sudah diambil oleh *policy makers* atau aktor pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah kebijakan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan (Monitoring)

Suatu program kebijakan akan menjadi catatan elit apabila program kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Kebijakan yang telah ditetapkan sebagai alternatif dalam upaya pemecahan masalah harus diimplementasikan, yang dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah pada tingkat yang lebih rendah.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan (Penilaian Kebijakan)

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kinerja dari suatu kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi baru dapat dilakukan apabila kebijakan tersebut sudah berjalan dalam kurun waktu tertentu. Semakin strategis suatu kebijakan, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan evaluasi guna menilai seberapa efektifkah kebijakan tersebut dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi.

Berdasarkan pada tahapan dalam pembuatan kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan tidak lantas muncul secara tiba-tiba, namun suatu kebijakan

hadir melalui proses yang panjang. Adapun penelitian ini berfokus pada tahap *agenda setting* dalam kebijakan dalam pelarangan serta penutupan penjualan melalui TikTok Shop. Dengan adanya isu mengenai permasalahan yang terjadi saat ini, bagaimana isu-isu tersebut kemudian dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan dapat memunculkan tuntutan berupa adanya kebijakan penyesuaian terkait hal tersebut. Tahap *agenda setting* merupakan tahap perumusan masalah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan selaku Instansi yang bertanggung jawab dalam hal perizinan usaha.

PERUMUSAN MASALAH (AGENDA SETTING)

Kegiatan dalam rangka membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*) sering disebut dengan penyusunan agenda (*agenda setting*) (Madani, 2011). Agenda merupakan pola-pola tindakan pemerintah yang bersifat spesifik, yakni merupakan analisis tentang bagaimana suatu masalah didefinisikan, dikembangkan, diformulasikan dan dibuat pemecahannya. Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik (Puspita, 2016).

Penyusunan agenda kebijakan (*agenda setting*) dalam sebuah literatur dipahami sebagai sebuah fase dan proses strategis dalam kebijakan publik. Pada proses ini masalah-masalah publik yang terjadi dipahami dan dimaknai untuk kemudian disusun menjadi prioritas dalam agenda publik yang diperebutkan kedudukannya. Penyusunan agenda kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, termasuk keterlibatan stakeholder. Secara singkat, penyusunan agenda (*agenda setting*) menurut Anggara (2014) merupakan kegiatan dalam membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*).

Kraft dan Furlong sebagaimana dikutip dalam Abdal (2015) mendefinisikan *agenda setting* sebagai *how problems are perceived and defined, command attention, and get onto the political agenda* (bagaimana masalah-masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan tergolong menjadi agenda politik). Proses ini dimulai dengan kegiatan pendefinisian masalah, yakni kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan dan perumusan isu-isu yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Secara teoritis suatu isu akan cenderung memperoleh respons dari pembuat kebijakan untuk dijadikan sebagai agenda kebijakan publik jika memenuhi kriteria tertentu.

PROSES PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN MENURUT JOHN W. KIINGDON

Agenda setting di dalamnya terdapat isu-isu kebijakan sebagai hasil dari adanya silang pendapat diantara para aktor tentang arah dari suatu tindakan yang kemudian akan ditempuh oleh pemerintah. Isu kebijakan itu ada dikarenakan telah terjadi konflik atau diketahui terdapat perbedaan persepsi diantara baik itu para aktor atau pun suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat di waktu-waktu tertentu. Pandangan John W. Kiingdon (Indah, 2016) terdapat tiga aliran dalam tahapan *agenda setting* yaitu Aliran masalah (*problem stream*), Aliran kebijakan (*policy stream*), dan Aliran politik (*political stream*). John (Anggara, 2018) bahwa tidak semua dari masalah itu bisa dijadikan sebagai masalah publik, tidak semua pula masalah publik bisa menjadi isu, tidak semua isu bisa tampil dan tergolong masuk dalam agenda pemerintahan.

PROSES PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN MENURUT ANDERSON

Proses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson sebagaimana dikutip dalam Abdal (2015), antara lain:

1. *Private problems*, merupakan masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas, yakni hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung.
2. *Public problems* adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat.
3. *Policy issues* adalah perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah (*policy action*)
4. *Systemic agenda* adalah isu dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah
5. *Institutional agenda* adalah serangkaian isu yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah.

PROSES PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN MENURUT ROGER W. COBB

Roger W. Cobb dan Charles D. Elder (1972) sebagaimana dikutip oleh Madani (2011) membagi agenda menjadi dua macam, diantaranya: Agenda Sistematis (*Systemic Agenda*) dan Agenda Institusional (*Institutional Agenda*). Agenda Sistematis merupakan agenda yang

terdiri dari isu-isu yang secara umum dipersepsikan oleh anggota masyarakat politik sebagai masalah publik dan masalah lain yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah yang ada. Sedangkan Agenda Institusional diartikan sebagai serangkaian masalah yang secara eksplisit diangkat oleh lembaga (institusi) pengambil keputusan resmi untuk dijadikan pertimbangan sungguh-sungguh yang bersifat khusus dan konkret dalam pengambilan keputusan.

PROSES PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN MENURUT EVERETT ROGER

Pandangan Everett Rogers dan James Dearing (Elfrida, 2016) agenda setting merupakan proses liner yang terdiri dari tiga tahapan diantaranya: 1) *Media Agenda* yaitu penentuan prioritas isu-isu yang dimuat dan ditayangkan oleh media massa. Aspek-aspek dalam pembentukan media agenda diantaranya; *visibility* (visibilitas), *audience salience* (penonjolan) dan *valance* (valensi). 2) *Public Agenda* yaitu hasil dari agenda media yang kemudian telah memengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang menjadi pikiran publik. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pembentukan publik agenda diantaranya; *familiarity* (keakraban), *personal salience* (penonjolan pribadi) dan *favorability* (kesenangan). 3) *Policy Agenda* yaitu hasil dari agenda publik yang berinteraksi sedemikian rupa dengan apa yang dinilai penting oleh para pengambil kebijakan khususnya pemerintah. Aspek-aspek yang mempengaruhi diantaranya; *support* (dukungan), *likelihood of action* (kemungkinan kegiatan) dan *freedom of action* (kebebasan bertindak).

ANALISIS IDENTIFIKASI KEBIJAKAN

Terdapat beberapa faktor yang membedakan arus efek agenda setting. Salah satu faktor yang mendasar adalah sistem politik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara yang memegang azas demokrasi yang luas, maka agenda akan bermula dari agenda publik. Sementara di negara yang menerapkan sistem otoriter, agenda kebijaksanaan akan lebih cenderung menerapkan agenda media dan agenda publik. Pada dasarnya, arus agenda dapat dipengaruhi oleh karakteristik sumber atau lembaga yang menciptakan isu, dan ciri-ciri isu itu sendiri.

detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis

TikTok Shop Dilarang, Ini 3 Peringatan Keras dari Pemerintah!

Aulia Damayanti - detikFinance

Kamis, 28 Sep 2023 07:00 WIB

BAGIKAN



Gambar 2. Pelarangan dan Pencabutan Izin Berjualan di Tiktok

Sumber: Berita Detik Finance, (Diakses 06 Oktober 2023)

Analisis agenda setting dengan pendekatan John W. Kingdon melibatkan tiga aliran utama: aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*politics stream*). Dijelaskan secara rinci analisis untuk isu permasalahan menggunakan kerangka kerja ini:

1. Aliran Masalah (*Problem Stream*): Masalah yang paling mencolok adalah potensi risiko yang terkait dengan TikTok, seperti masalah privasi, keamanan data pengguna, konten berbahaya, atau penyalahgunaan platform. Keberlanjutan masalah ini dalam aliran masalah akan tergantung pada sejauh mana masalah ini mendapat perhatian media, penelitian, dan dukungan dari kelompok kepentingan.
 - 1) Identifikasi Masalah: Dalam aliran masalah, kita harus mengidentifikasi masalah yang muncul. Dalam konteks ini, masalah utama adalah kemungkinan adanya masalah terkait dengan konten berjualan di TikTok. Masalah ini bisa

mencakup keamanan data pengguna, penyalahgunaan platform, atau konten yang tidak pantas.

- 2) Fokus Media: Jika ada laporan media yang signifikan tentang masalah-masalah ini, seperti insiden-insiden keamanan data atau kontroversi yang melibatkan berjualan di TikTok, maka isu tersebut akan mendapatkan perhatian di aliran masalah.

2. Aliran Kebijakan (*Policy Stream*)

Pelarangan atau pencabutan izin dagang di TikTok adalah respon dari aliran kebijakan terhadap masalah tersebut. Pembuat kebijakan harus mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

- 1) Solusi yang diusulkan, seperti larangan berjualan di TikTok, adalah salah satu kebijakan yang mungkin diterapkan untuk mengurangi risiko yang ada. Pada konteks ini, dampak terhadap masyarakat yang berjualan secara offline menjadi penting. Kebijakan seperti pelarangan berjualan di TikTok dapat mempengaruhi banyak pedagang kecil dan usaha kecil menengah yang bergantung pada platform ini untuk mencapai pelanggan mereka. Dampak ini bisa berupa penurunan pendapatan, kerugian pekerjaan, atau bahkan penutupan usaha.

3. Aliran Politik (*Politics Stream*):

Pada proses agenda setting, faktor politik dan opini publik juga memiliki peran. Keputusan mengenai pelarangan atau pencabutan izin akan tercermin dalam kebijakan yang diterapkan dan akan berdampak pada berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang aliran masalah dan implikasi kebijakan adalah kunci dalam mengidentifikasi kebijakan yang tepat dalam konteks isu ini.

- 1) Faktor Politik: Isu-isu politik seperti pendapat publik, pemilihan umum, atau tekanan dari kelompok kepentingan akan mempengaruhi apakah kebijakan seperti larangan berjualan atau pencabutan izin akan diberlakukan atau tidak.
- 2) Agenda Politik: Isu ini akan menjadi prioritas dalam agenda politik jika ada keselarasan antara aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, termasuk kepentingan partai politik atau keputusan pemimpin pemerintahan.

Analisis agenda setting Kingdon untuk isu ini akan tergantung pada sejauh mana masalah ini mendapatkan perhatian di media dan seberapa kuat tekanan dari kelompok kepentingan serta faktor-faktor politik yang ada. Jika masalah ini mendapat perhatian yang besar, mendapatkan dukungan kuat dari kelompok kepentingan, dan relevan dengan agenda politik saat itu, maka kemungkinan besar akan muncul diskusi serius tentang larangan berjualan atau pencabutan izin berjualan di TikTok sebagai opsi kebijakan.

KESIMPULAN

Peningkatan pengawasan dan regulasi terhadap TikTok Shop dalam konteks analisis kebijakan agenda setting melibatkan berbagai tahap dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, aliran masalah (*problem stream*) mengidentifikasi permasalahan yang mendasari kebutuhan untuk pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap TikTok Shop. Masalah utama termasuk masalah privasi data, penipuan, dan penjualan produk ilegal yang terkait dengan platform tersebut.

Kemudian, aliran kebijakan (*policy stream*) memperhatikan solusi-solusi potensial untuk mengatasi masalah tersebut. Para pembuat kebijakan dapat mengusulkan berbagai langkah seperti peraturan yang lebih ketat, persyaratan transparansi, atau penegakan hukum yang lebih kuat untuk mengendalikan praktik-praktik yang merugikan pengguna TikTok Shop.

Selanjutnya, dalam aliran politik (*politics stream*), faktor-faktor politik, opini publik, dan tekanan dari kelompok kepentingan akan mempengaruhi kemungkinan pengadopsian kebijakan pengawasan dan regulasi. Dukungan dari kelompok advokasi konsumen atau perusahaan teknologi yang peduli terhadap integritas platform dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi pembuat kebijakan.

Agenda setting adalah tahap terakhir dalam proses ini, di mana kebijakan pengawasan dan regulasi TikTok Shop menjadi perhatian utama pemerintah. Keselarasan antara aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik akan menentukan sejauh mana agenda ini akan diimplementasikan. Dampaknya adalah peningkatan perlindungan konsumen, keamanan pengguna, dan integritas TikTok Shop, sekaligus memberikan pedagang online dan pengguna platform itu sendiri rasa kepercayaan yang lebih besar dalam bertransaksi dan berinteraksi di lingkungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik).
- Amanta, L., & Kusumasari, B. (2019). Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan : Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta Actor Intervention in Influencing Environmental Policy Formulation: The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogya. 15(2), 179–198.
- Anggara, S. dan E. S. (2014). Kebijakan Publik Pengantar (cetakan ke). CV. Pustaka Setia.
- Elfrida, S. V. (2016). Proses Membangun Agenda Setting Kebijakan Pada Portal Berita Pemerintah dan Kesesuaiannya dengan Agenda Media Online The Process of Building Policy of Agenda Setting Through The Government Santhy. Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi. 6(1): 13–26.
- Hamidah, Z. N. (2019). Kebijakan Pelayanan dalam Pengelolaan Identitas Jemaah Haji Tahun 2018 (Studi Pada Pembuatan Paspor Bagi Calon Jemaah Haji Reguler di Wilayah Yogyakarta).
- Howlett, M. (2014). Analyzing Multi-Actor, Multi Round Public Policy Decision Making Processes in Government: Findings from Five Canadian Cases. Canadian Beyond Markets and Collaborative Governance. Policy Sciences.
- Indah. (2021). Kemenag Gelar Bahtsul Masail Bahas Haji di Masa Pandemi. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-gelar-bahtsul-masail-bahas-haji-di-masa-pendemi-3qdlw>.
- Puspita, R. I. (2016). Analisis Penyusunan Agenda Kebijakan Publik (Studi Kajian Agenda Penyusunan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Rtrw Oleh Industri Cv. Evergreen Indogarment).
- Taufiqurrokhman. (2014). Kebijakan Publik. In Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maestopo Beragama (Pers) (Cetakan Pe, Issue 1993). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Zahariadis, N. (2016). Handbook of public policy agenda setting. In Handbook of Public Policy Agenda Setting. Edward Elgar Publishing, Inc.